

ABSTRAK

Latar Belakang: Pemberian ASI Eksklusif masih berada di bawah target nasional, target cakupan ASI eksklusif yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) ataupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah 80% (Kemenkes 2017). Kabupaten Kudus adalah kabupaten dengan cakupan ASI terendah di Jawa Tengah. Jumlah Wanita bekerja di Industri Pengolahan Hasil Tembakau sangat besar. Pemberian ASI Eksklusif harus didukung bukan hanya dari pemerintah dan tenaga kesehatan saja namun oleh semua pihak, termasuk penyelenggara kerja. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah dengan penyediaan ruang laktasi dan kesempatan memerah ASI di waktu bekerja di tempat kerja.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ASI Eksklusif yang diatur Perbup Kudus 16/2016, khususnya ketersediaan ruang laktasi bagi Ibu Bekerja dan kesempatan memerah ASI di industri padat karya (industri pengolahan hasil tembakau) di PT Djarum area Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian ini menggali Implementasi Kebijakan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.

Hasil: Implementasi Kebijakan Perbup Kudus 16/2016 khususnya penyediaan Ruang Laktasi dan penyediaan kesempatan memerah ASI dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel: (1) Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan (2) Sumber Daya (3) Karakteristik organisasi pelaksana (4) Komunikasi antar organisasi (5) Disposisi atau sikap para pelaksana (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam praktiknya, sikap implementer berupa komitmen dan dukungan menjadi factor pembeda dan penentu kinerja kebijakan. Komitmen dan dukungan implementer mengatasi beragam ketidaksesuaian kebijakan dengan dinamika implementasi

Kesimpulan: Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi dan kesempatan memerah ASI di waktu kerja telah berjalan dengan baik. Tantangan dalam implementasi dapat teratasi karena dukungan dan sikap implementer. Perlu koordinasi yang lebih baik diantara para stakeholder agar outcome terlindunginya kesempatan menyusui/memerah ASI bagi ibu bekerja dapat sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, ASI EKSLUSIF, Wanita Bekerja

ABSTRACT

Background: Exclusive breastfeeding is still below the national target, the exclusive mother's milk coverage target set by the World Health Organization (WHO) or the Ministry of Health (MOH) is 80% (MOH 2017). Kudus District is the district with the lowest Exclusive breastfeeding coverage in Central Java. The number of women working in the tobacco processing industry is very large. Exclusive breastfeeding must be supported not only by the government and health workers but by all parties, including work organizers. One form of support that can be provided is by providing lactation rooms and opportunities to express Exclusive breastfeeding working hours in the workplace.

Purpose: This study aims to describe the implementation of the Exclusive breastfeeding policy regulated by the Kudus District Head Regulation 16/2016, specifically the availability of lactation rooms for working mothers and breastfeeding opportunities in labor-intensive industries (tobacco products processing industry) at PT Djarum Kudus Regency.

Methods: This research is a case study research. This research explores Policy Implementation through document review and in-depth interviews.

Results: The implementation of the Kudus Regent Regulation 16/2016, especially the provision of Lactation Rooms and the provision of opportunities to express breastfeeding by referring to the theory of Van Meter and Van Horn to achieve high policy implementation performance which is influenced by several variables: (1) Policy standards and objectives or policy measures and objectives (2) Resources (3) Characteristics of implementing organizations (4) Inter-organizational communication (5) Disposition or attitudes of implementers (6) Social, economic and political environment. In practice, the attitude of the implementer in the form of commitment and support is a differentiating factor and determines policy performance. Implementer commitment and support overcome various policy mismatches with implementation dynamics.

Conclusion: The implementation of the policy on the provision of lactation rooms and mother's milk opportunities during working hours has gone well. Challenges in implementation can be overcome due to the support and attitude of implementers. Better coordination among stakeholders is needed so that the outcome of protecting the opportunity to breastfeed/ pump breastfeeding for working mothers can be fully achieved.

Keyword: Policy Implementation, Exclusive Breastfeeding, Working Mother